

Uang Kertas, Barter Pembukuan, dan Uang Kain:

Konversi ‘Uang Peruntukan Khusus’ dalam Perdagangan Kain dan Damar di Sulawesi, Indonesia, 1860-1905

Albert Schrauwers

Editor terjemahan: Dwi Elyono

Abstrak: Perdagangan kain katun dan damar pada akhir abad ke-19 di Sulawesi berlangsung dalam tiga lingkup pertukaran berbeda yang dimediasi oleh barter. Para pengguna akhir di dataran tinggi Sulawesi mengubah kain buatan Eropa menjadi uang peruntukan khusus seperti yang terjadi dalam kasus klasik pengubahan batang kuningan menjadi uang peruntukan khusus oleh suku Tiv di Afrika. Berbeda dengan perlakuan Bohannon terhadap praktik yang dilakukan suku Tiv, saya memasukkan penggunaan uang kain oleh penduduk dataran tinggi dalam kerangka analitik yang sama dengan penggunaan uang oleh perusahaan-perusahaan perdagangan Eropa dan perantara-perantara lokalnya. Masing-masing dari tiga lingkup pertukaran ini menggunakan sebuah uang peruntukan khusus yang berbeda, yang menjalankan hanya beberapa fungsi dari uang peruntukan umum. Para pedagang Eropa menggunakan “kertas finansial” sebagai “alat pertukaran” dengan para mitra orang Eropa. Mereka menggunakan sebuah sistem “barter pembukuan” untuk mengelola perdagangan dengan perantara-perantara lokal mereka, di mana uang saat ini berfungsi sebagai sebuah “standar nilai” dan “satuan hitung”. Terakhir, penduduk dataran tinggi memanfaatkan kain katun yang mereka tukarkan dengan damar sebagai “alat pembayaran”, tetapi bukan sebagai “alat pertukaran”. Dengan mengkaji bagaimana uang secara sosial tertanam dalam tiga lingkup pertukaran, kita bisa mendapatkan sebuah perspektif alternatif tentang penciptaan banyak "mata uang sosial" klasik yang muncul dari jaringan perdagangan internasional awal.

[pertukaran hadiah, barter, uang, Indonesia, hierarki politik, persembahan keagamaan, kolonialisme]

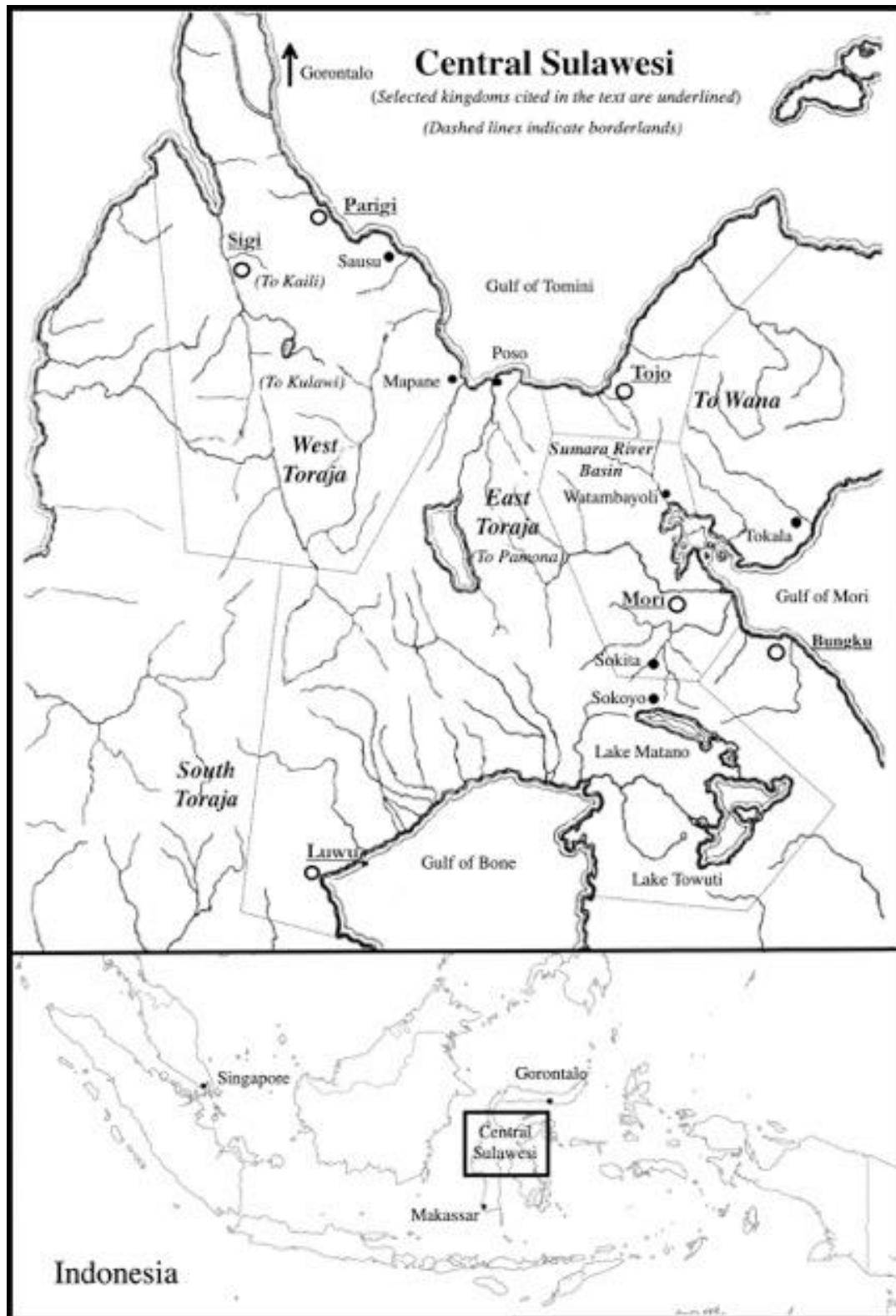
*Tulisan ini adalah terjemahan dari artikel saya dalam bahasa Inggris “[Banknotes, Bookkeeping Barter and Cloth Money: Conversions of ‘Special Purpose Money’ in the Cloth and Dammar Trade of Sulawesi, Indonesia, 1860-1905](#)” *Economic Anthropology* Vol. 8, No. 2 (2021).*

Suku-suku bangsa tanpa pasar di dataran tinggi bagian tengah dan timur di Sulawesi Tengah, Indonesia, bergabung dalam jaringan perdagangan kain katun dan damar internasional di akhir abad kesembilan belas. Mereka terlibat dalam pertukaran barter antara barang satu dengan barang lainnya dengan para pedagang pesisir Bugis, Arab, dan Cina. Para pedagang ini, pada gilirannya, menjalin hubungan yang penuh rintangan dengan kerajaan-kerajaan pesisir pribumi yang mengelilingi pulau Sulawesi, di satu sisi, dan dengan perusahaan-perusahaan perdagangan Belanda, di sisi lain.¹ Pertukaran-pertukaran yang berlangsung lintas "register nilai" (atau "lingkup pertukaran") ini memunculkan sebuah masalah yang sulit: barter kain katun untuk mendapatkan damar membuat pertukaran ini benar-benar bergantung pada apa yang disebut oleh para ekonom sebagai "ketidaknyamanan dari kemunculan dua keinginan yang terjadi secara bersamaan," yaitu bahwa masing-masing dari kedua belah pihak harus saling menginginkan barang yang hendak dipertukarkan oleh pihak satunya. Dalam "teori barter uang", yang telah menjadi sebuah mitos mendasar dalam ilmu ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa ketidaknyamanan yang secara terus-menerus mengganggu ini memicu penciptaan uang, sebuah komoditas universal yang diinginkan oleh semua orang yang dapat memperlancar barter di pasar.

Saya menggarisbawahi bahwa penduduk dataran tinggi terus memperoleh kain katun melalui barter, namun mengubahnya di kalangan mereka sendiri menjadi apa yang oleh para antropolog disebut sebagai *uang peruntukan khusus*, yang digunakan untuk "pembelian" (*maoli*) dan juga dapat diartikan sebagai "hadiah" (Kruyt 1923, 1933; Mauss 1923; Schrauwers 2019). Uang peruntukan khusus ini dapat digunakan dalam pembayaran denda dan dalam ritual reproduksi sosial, tetapi tidak digunakan sebagai media pertukaran untuk mendorong perdagangan lintas register nilai, yang, menurut Smith ([1778]1798, 27-34), seharusnya terjadi. Kasus ini paralel dengan argumen yang dibuat oleh Paul Bohannon (1959) tentang suku Tiv di Afrika, yang menggunakan batang kuningan yang diperoleh dari luar wilayah Tiv sebagai "uang peruntukan khusus" dalam sebuah lingkup pertukaran terbatas, tidak sebagai media pertukaran, tetapi untuk menciptakan jenis-jenis hubungan sosial spesifik (cf. Barnes dan Barnes 1989, 413; Guyer 2004, 15). Graeber (2011, 130) secara berbeda menyebutnya sebagai "mata uang sosial" yang digunakan dalam sebuah "ekonomi manusia" (Hart 2017). Berlawanan dengan Bohannon, saya berargumentasi dalam artikel ini bahwa mata uang kertas yang digunakan dalam perdagangan Eropa sama-sama merupakan "mata uang sosial" yang juga menciptakan hubungan sosial daripada sekadar

¹ Kelompok-kelompok yang dibahas di sini termasuk To Mori dan sejumlah kelompok yang berbeda-beda yang secara kolektif dijuluki "Toradja" oleh etnografer misionaris Albert Kruyt dan Nicholas Adriani, yang informasi berharga dalam karya ekstensifnya mengilhami artikel ini (Adriani & Kruyt 1912; Kruyt 1930; Kruyt 1938; J.Kruyt 1924). Di sini, saya menyebut kelompok-kelompok individual

dengan etnonim mereka yang diterima saat ini, misalnya, To Pamona untuk "Toraja Timur." Hanya Sadan Toraja yang mempertahankan etnonim Toraja, dan mereka tidak dimasukkan dalam analisis ini. Sebagian besar analisis berfokus pada Sulawesi bagian tengah dan tengah-timur; untuk kajian perdagangan dan penggunaan kain di Sulawesi bagian tengah-barat, lihat Aragon (1996).



objek yang memungkinkan terjadinya pertukaran pasar yang bersifat segera dan anonim.

Pada akhir abad kesembilan belas, Sulawesi hanya dimasukkan secara longgar ke dalam wilayah kolonial Hindia Belanda. Hanya

wilayah-wilayah kecil di ujung utara pulau Sulawesi dan pelabuhan selatan Makassar yang secara langsung diperintah penguasa kolonial Belanda, sementara wilayah-wilayah lainnya dengan tingkatan yang bervariasi diperintah oleh Belanda secara tidak langsung. Makassar dideklarasikan sebagai sebuah pelabuhan bebas pada tahun 1847, yang merupakan hasil dari liberalisasi perlahan yang dilakukan oleh penguasa kolonial. Pendeklarasian Makassar sebagai sebuah pelabuhan bebas menandai berakhirnya upaya Belanda untuk memonopoli perdagangan; hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan arus lalu lintas secara signifikan dengan separo wilayah Nusantara bagian timur, termasuk peningkatan jaringan perdagangan budak yang dilakukan oleh orang-orang pribumi, yang sebagian besar dikendalikan oleh para pedagang Bugis (Sutherland 2013). Imperialisme Belanda terhalang oleh sebuah “kebijakan abstensi” resmi yang diterapkan karena Belanda takut menghadapi kemungkinan terjadinya perang yang menghabiskan banyak biaya seperti perang yang terjadi di Aceh, Sumatra, yang berlangsung lebih dari 30 tahun. Kebijakan menahan diri ini kemudian dilonggarkan seiring dengan meningkatnya laju perdagangan, penemuan emas di beberapa wilayah di utara pulau Sulawesi, dan ketakutan akan persaingan klaim kolonial (Van Beurden 1985).

Sebagai konsekuensi dari liberalisasi perdagangan, sekelompok perusahaan dagang Jerman didirikan di Sulawesi Selatan pada tahun 1860-an sebagai upaya untuk melibatkan diri mereka dalam perdagangan Cina yang makmur yang memperjual-belikan hasil-hasil laut dan hutan, termasuk kopi, rotan, kopra, dan damar (Horn 1997). Untuk keperluan tersebut, mereka harus menjalin hubungan dagang dengan pedagang Cina, Arab, dan Bugis (*anakoda*) yang berperan sebagai perantara dengan suku-

suku bangsa pedalaman. Ikatan-ikatan perdagangan baru ini menekan pola-pola perdagangan yang sudah ada sebelumnya, yang didirikan oleh kerajaan-kerajaan pribumi (yang sebagian besar Bugis) dengan masyarakat-masyarakat dataran tinggi animis yang mana darinya besi, kopi, dan damar telah lama diekspor. Yang tertua dari kerajaan-kerajaan tersebut adalah Kerajaan Luwu, yang telah terlibat dalam perdagangan ini selama 6 abad (Bulbeck at al. 2016). Uang kain peruntukan khusus yang digunakan oleh penduduk dataran tinggi harus ditempatkan dalam konteks perdagangan pribumi jangka panjang ini. Kita harus berhati-hati untuk tidak berasumsi bahwa penduduk dataran tinggi hidup di luar konteks perdagangan internasional ini sehingga mereka perlu dibantu untuk masuk ke dalamnya dengan mengenalkan mereka pada uang peruntukan umum. Seperti yang terjadi di pedalaman Kalimantan, pulau tetangga Sulawesi di sebelah barat, mereka telah menjalankan produksi komoditas untuk pasar global selama berabad-abad (Dove 2011: 6, 13-17).

Untuk memahami uang kain peruntukan khusus yang digunakan oleh penduduk dataran tinggi ini, kita harus memperhatikan posisi mereka dalam dua bentuk formasi negara yang saling bersaing, yaitu kerajaan-kerajaan pribumi dan negeri kolonial Belanda di mana mereka berada. Uang kain ini merupakan bagian terintegrasi dari jaringan-jaringan perdagangan pribumi dan merupakan sarana yang menggabungkan mereka dengan negara-negara pesisir yang berbasis perdagangan pribumi. Ritual-ritual reproduksi sosial penduduk dataran tinggi, dan sistem keadilan retributif mereka, bergantung pada peredaran uang kain ini, yang pada gilirannya mengarah pada ketergantungan mereka pada negara-negara pesisir yang mana melaluinya mereka mendapatkan uang kain ini. Kain yang digunakan sebagai uang ini

diperkenalkan ke wilayah-wilayah dataran tinggi melalui praktik seperti pemberian hadiah *mobalu sala* (tidak benar-benar untuk dijual), yang mana dengannya negara-negara pesisir mengambil upeti. Masuknya pedagang dan kain Eropa ke dalam sistem perdagangan ini awalnya memperkuat proses pembentukan negara-negara pribumi di masa abstensi Belanda. Meskipun mereka akhirnya mendominasi perdagangan ini, para pedagang Eropa hampir-hampir tidak membawa kemajuan dalam memperkenalkan pasar kapitalis atau sebuah “media pertukaran universal” yang secara langsung akan mengintegrasikan penduduk dataran tinggi ke dalam lingkup perdagangan kolonial Belanda.

Seperti yang telah ditekankan oleh Guyer (2004, 28) dalam konteks Afrika Barat di Tiv, mata uang sosial ini perlu dilihat dari sebuah perspektif perdagangan regional. Menanggapi kritik Pietz terhadap analisis konteks Tiv, saya berhati-hati mengamati mata uang sosial yang digunakan oleh para pedagang Eropa dalam perdagangan regional ini: “Salah satu alasan mengapa etnografi tidak pernah bisa memenuhi persyaratan proyek-proyek antropologi adalah fakta bahwa etnografi tidak memiliki satu pun metode perbandingan yang memuaskan. Hal ini mempersyaratkan bahwa seorang etnografer harus melakukan, selain sebuah analisis yang bisa dipahami dengan mudah dan jelas terhadap suatu budaya asing, juga sebuah analisis yang eksplisit dari masyarakatnya sendiri” (Pietz 1995, 38). Oleh karena itu, saya berargumentasi bahwa kurangnya keberhasilan para pedagang dalam memperkenalkan sebuah uang universal dapat dikaitkan dengan ketergantungan mereka pada jenis teknologi pertukaran yang sama dengan yang digunakan oleh negara-negara pesisir untuk memungut upeti. Para pedagang Eropa ini menggunakan instrumen-instrumen finansial kapitalis paling

maju pada zamannya, tetapi tidak bergantung pada sebuah uang “universal” dalam perdagangan kapas dan damar. Mereka menggunakan “surat wesel” yang dikombinasikan dengan “barter pembukuan,” yang menjalankan beberapa, tetapi tidak semua, dari fungsi-fungsi uang universal. Dengan menggabungkan uang peruntukan khusus Eropa mereka sendiri dengan teknologi-teknologi pertukaran pribumi, mereka mampu mengubah “mengambil upeti” menjadi “menghasilkan keuntungan” tanpa mengubah proses-proses pada formasi negara pribumi atau karakter dari uang peruntukan khususnya.

Teknologi Pertukaran Pedagang Eropa: Kertas Finansial

Artikel ini difokuskan pada teknologi-teknologi pertukaran yang digunakan dalam sebuah register nilai dan yang digunakan untuk menjembatani pertukaran lintas register nilai. Disebut sebagai “uang,” teknologi-teknologi pertukaran ini memungkinkan skenario perdagangan yang jauh lebih kompleks daripada oposisi Smith ([1778] 1798, 27-34) terhadap barter dengan pertukaran pasar. Argumen Bohannan (1959) tentang uang batang kuningan suku Tiv berusaha membalikkan mitos mendasar Smith tentang barter sebagai asal-usul uang dan argumen Bohannan sendiri merupakan dasar bagi “aliran substantivis” dalam antropologi ekonomi. Bohannan (1959) berpendapat bahwa “uang peruntukan umum” dalam ekonomi-ekonomi pasar Barat menjalankan lima fungsi yang berbeda-beda dan terpisah: sebagai media pertukaran di pasar (komoditas universal Smith), sebagai metode pembayaran (termasuk pembayaran non-pasar seperti pajak atau retribusi persepuluhan), sebagai simpanan kekayaan, sebagai standar nilai, dan sebagai satuan hitung. Sebaliknya,

Bohannon berpendapat bahwa uang peruntukan khusus yang digunakan dalam masyarakat non-pasar dapat dipertukarkan hanya dalam lingkup pertukaran terbatas (register nilai) dan hanya menjalankan dua atau tiga dari fungsi-fungsi tersebut. Aliran substantivis diilhami oleh teori Karl Polanyi tentang “keterlekatan” ekonomi dalam hubungan-hubungan sosial dalam masyarakat non-pasar, dan aliran substantivis itu sendiri berkiblat pada aliran Jerman “ekonomi historis” dalam mengembangkan strategi-strategi representasional “ekonomi primitif” (Kahn 1990).² Masalah yang ada pada pendekatan ini adalah diabaikannya uang peruntukan khusus yang digunakan oleh orang Eropa itu sendiri.

Aliran historis Jerman menolak teori Smith tentang barter sebagai asal muasal uang dan mengajukan sebuah “teori non-pasar tentang asal mula uang, dan selain itu, menekankan peran penting dari 'negara' (atau 'pemerintah') dalam reproduksi sistem moneter” (Ingham 1996, 516, huruf cetak miring sesuai aslinya; Kahn 1990). Hart membandingkan pendekatan-pendekatan teoretis ini dengan wajah Janus (dua wajah yang bertolak belakang) yang ada pada uang: ekor sebagai komoditas yang digerakkan oleh pasar, dan kepala sebagai tanda atau token yang didukung oleh negara. Hart menghimbau para antropolog memperhatikan hubungan antara transaksi moneter yang dimediasi oleh pasar dan yang diatur oleh negara (Hart 1986). Wolters menunjukkan bahwa negara Hindia Belanda mengumumkan secara resmi nilai dari banyak sekali mata uang yang digunakan yang terkait dengan sebuah satuan hitung yang disetujui negara dan yang belum pernah dicetak, yaitu rijksdollar NEI (Hindia Belanda), dan bahwa “fungsi ukur”

dari “uang imajiner” ini berbeda dengan fungsi pertukaran dari beragam uang keras (uang bernilai tetap yang terbuat dari benda-benda berharga, seperti emas, platinum, dan perak) yang digunakan di Nusantara. Wolters menyimpulkan bahwa “dua fungsi tersebut sama sekali berbeda dan pada prinsipnya tidak saling berhubungan, meskipun dalam sistem kerja moneter mana pun keduanya, agaknya, harus ada secara bersama” (Wolters 2008: 38).

Sepanjang abad kesembilan belas, kebijakan moneter Belanda di Hindia Belanda secara ironis menyebabkan kekurangan sebuah “media pembayaran yang beredar.” Belanda telah mencatat bahwa koin perak yang diimpor ke wilayah tersebut dengan cepat menghilang dari peredaran, namun kemudian diperdagangkan dengan harga premium, yang membuat mereka mengira bahwa perak dihargai 20-25% lebih tinggi di Asia daripada di Eropa (Wolters 2008, 45, 52). Mereka berusaha memanipulasi nilai tukar koin-koin yang ada dengan meninggikan nilai (melakukan overvaluasi terhadap) koin perak untuk mencegahnya dibeli dengan koin tembaga yang bernilai lebih rendah, yang ditarik dari peredaran, dan dilebur demi kandungan peraknya. Namun demikian, keuntungan pribadi yang diperoleh dari hasil manipulasi ini dengan segera menekan kebijakan negara dan hilangnya perak dari Hindia Belanda terus berlanjut meskipun dilakukan impor dalam jumlah besar. Sebuah Undang-Undang Mata Uang baru yang diperkenalkan pada tahun 1864 tidak berhasil menarik semua koin tembaga. Namun demikian, koin perak yang telah ditinggikan nilainya terus menghilang. Meskipun koin tembaga kemudian tidak memiliki status resmi, koin tersebut terus digunakan. Pertumbuhan perdagangan di Makassar setelah men-

² Kahn menggarisbawahi pentingnya pemikiran Aliran Historis Jerman dan kritik antikapitalisnya terhadap ekonomisme yang ditujukan secara khusus kepada

Weber dan Polanyi, dan, selanjutnya, pada pemikiran Aliran Substantivis dalam Antropologi.

jadi pelabuhan bebas, dengan demikian, sangat bergantung pada bentuk-bentuk “uang kredit” yang tidak cukup memadai dari Bank Jawa (De Javasche Bank) yang membuka cabangnya di sana pada tahun 1864 (K. Sutherland 1864).

Karena langkanya media pembayaran yang beredar, perusahaan-perusahaan dagang besar bergantung pada “surat wesel” dan pinjaman uang kertas dari Bank Jawa (uang kredit) untuk menutupi pengeluaran mereka dalam waktu setengah tahun, waktu yang mereka butuhkan untuk menjual produk mereka di Singapura dan Eropa dan memulangkan pendapatan yang mereka peroleh (Claver 2014, 80). Uang kertas pada periode ini adalah uang peruntukan khusus yang berfungsi sebagai alat pertukaran, tetapi tidak dapat berfungsi sebagai simpanan kekayaan seperti halnya uang koin. Pada periode ini, emas dan perak merupakan komoditas yang nilai pasarnya berbeda dari nilai nominal mereka, tetapi uang kertas tidak seperti ini sistemnya; mata uang kertas harus didukung oleh sesuatu yang lain, dengan nilai nominalnya dipastikan oleh jaminan konvertibilitasnya (bahwa ia dapat ditukarkan dengan) ke dalam komoditas yang memiliki nilai “intrinsik,” seperti emas (dalam hal ini standar emas). Polanyi (1957, 72-73), dengan demikian, mengacu pada mata uang kertas yang dicetak pada abad kesembilan belas sebagai “komoditas fiktif.” Uang kertas pada periode itu merupakan surat hutang, yang merupakan “janji untuk membayar” dalam bentuk emas dan perak jika pemilik uang kertas menjualkannya di bank untuk ditebus. Nilai uang kertas tersebut bergantung pada kepercayaan publik terhadap kemampuan bank untuk menukarkannya dengan sebuah bentuk “uang keras” (uang bernilai tetap yang terbuat dari benda berharga). Meski demikian, uang kertas tersebut jarang ditebus, tetapi mempertahankan nilainya dan terus beredar karena adanya

kepercayaan publik atas kemampuan bank untuk menebusnya. Kepercayaan publik tersebut seringkali salah tempat, karena bank ternyata sering meminjamkan uang kertas senilai lebih dari tiga kali cadangan uang koin mereka, sambil mengumpulkan bunga atas surat hutang mereka sendiri yang beredar.

Baik uang kertas maupun surat wesel melibatkan bank atau pemberi pinjaman lain yang menerbitkan “surat wesel” (kertas finansial) kepada pedagang dengan penjualan akhir dari barang dalam perjalanan sebagai jaminan. Surat wesel sendiri, setelah diendorses oleh pedagang, dapat diedarkan sebagai alat pertukaran jangka pendek untuk membayar pihak ketiga setempat yang dapat mengklaim uang (uang koin) yang nilainya setara dari pemberi pinjaman awal di kemudian hari atau mengendorses kertas finansial tersebut dan mengedarkannya lebih lanjut kepada orang lain sebagai alat pembayaran; dalam kasus terakhir, wesel yang telah diendorses mengikat serangkaian pengendorses dalam suatu hubungan jangka panjang berdasarkan rasa saling percaya, karena kegagalan penerbit wesel untuk membayar kembali pada saat jatuh tempo akan membatalkan seluruh rangkaian transaksi pasar. Uang kertas, surat promes (surat sanggup bayar), dan surat wesel seperti ini berfungsi sebagai media pertukaran, sehingga meringankan masalah kekurangan uang tunai, tetapi mereka tidak menjalankan semua fungsi potensial uang, termasuk fungsinya sebagai simpanan kekayaan. Bahkan sebagai alat pertukaran, surat wesel tidak bisa memungkinkan diadakannya transaksi pasar yang sebenarnya di antara orang yang saling tidak mengenal. Mereka tidak memiliki nilai komoditas intrinsik dan pada kenyataannya merupakan surat hutang yang seringkali hanya diterima dengan potongan harga. Surat wesel dan uang kertas Bank Jawa adalah uang peruntukan khusus yang beredar

sebagai media pertukaran tanpa menjalankan fungsi-fungsi uang lainnya.

Perdagangan damar di masa kolonial Belanda

Perhatian utama saya di sini adalah pada perdagangan kain katun³ yang diperdagangkan oleh orang Eropa dengan damar yang berlangsung jauh dari pusat kekuasaan kolonial dan pada teknologi pertukaran yang memungkinkan diadakannya perdagangan tersebut. Damar (salah satu kopal getah) adalah resin pohon yang dihargai di Eropa abad kesembilan belas dalam produksi pernis gambar, meskipun telah digunakan selama berabad-abad di seluruh Asia Tenggara dan Cina sebagai pernis (Bulbeck et al. 2016, 177). Damar dikumpulkan dengan menyadap pohon sogu yang terletak di daerah Danau Towuti dan lembah sungai Sumara di Sulawesi Timur (Gambar 1), meskipun para pemanennya berasal dari seluruh wilayah Sulawesi. Diperkirakan bahwa 1500 pengumpul damar berkumpul setiap tahun di lembah sungai Sumara saja (Kruyt 1900c, 462). Penguasaan wilayah-wilayah tersebut, dan oleh karenanya perdagangan damar di sana, diperebutkan dengan sengit oleh kerajaan-kerajaan pribumi yang mengelilingi wilayah-wilayah tersebut. Pada tahun 1860, para pedagang Cina yang berbasis di Makassar mulai menetap di pusat-pusat dari kerajaan-kerajaan pesisir ini dan, melalui perkawinan campuran dengan anggota-anggota keluarga dari kaum elit yang berkuasa dan pembiayaan istana-istana mereka, dengan cepat menguasai perdagangan damar. Sekitar 3.000 sampai 3.800 pikul⁴ damar yang bernilai antara f 12 dan f 18 / pikul (f 36.000-68.400) diekspor melalui

Gorontalo setiap tahun pada tahun 1887-1888 (Van Hoëvell 1893, 4). Makassar mengekspor kembali hampir sepuluh kali lipat: 25.000 pikul dalam setahun dari Teluk Mori dan 2.000 pikul lagi dari Teluk Bone (Goedhart 1908, 513-4, 520).

Pedagang-pedagang Cina dan Arab ini adalah klien Bauermann & Co., salah satu perusahaan dagang di Makassar yang mana darinya mereka memperoleh produk dan kredit. Pedagang Jerman Douwe Bauermann dengan beberapa saudara laki-laki tirinya pada tahun 1869 mendirikan Bauermann & Co. sebagai pengekspor kopi, rotan, dan damar dengan kantor pusat di Makassar di selatan, dan di Gorontalo di utara (Van Hoëvell 1891, 38; Van Horn 1997, 140-41; Van Musschenbroek 1880, 97). Mereka mendirikan agen-agen di Jawa, Bali, Lombok, Timor, dan Maluku, yang dilayani oleh kapal-kapal uap mereka sendiri. Kapal-kapal uap tersebut melintasi tepian Teluk Tomini dari Gorontalo di utara, mengumpulkan hasil hutan yang dikumpulkan oleh para pedagang asosiasinya. Bisnis Bauermann awalnya sangat sukses, tetapi perusahaan mereka bangkrut pada tahun 1879 karena penurunan perdagangan secara umum pada tahun itu (Van Horn 1997, 143-45). Kekayaan keluarga Bauermann diselamatkan oleh kemitraan dengan J.A. Parmentier pada tahun 1879 dan pembentukan selanjutnya dari Perusahaan Dagang Gorontalo pada tahun 1883 (Broersma 1931a, b, 230ff). Dengan pembentukan perusahaan tersebut, ekspor melalui Gorontalo meningkat secara eksponensial dari f 25.000 pada tahun 1856 menjadi f 1.360.000 pada tahun 1886 (Van Hoëvell 1891, 42).

Perusahaan Perdagangan Gorontalo dengan cepat menghadapi masalah solvabilitasnya sen-

³ Sebuah analisis terperinci tentang kisaran kain katun produksi Belanda dan India dan kain ikat tenun dari Sulawesi Selatan yang beredar di dataran tinggi,

dengan memperhatikan penggunaannya ritual, disajikan dalam Kotilainen (1992, 85-109).

⁴ Satu pikul setara dengan 60 kg.

diri ketika Bauermann terperosok dalam skandal keuangan dengan Bank Jawa (De Javasche Bank) dan terpaksa diawasi oleh kurator karena berada di ambang kebangkrutan (berada dalam keadaan *receivership*); perusahaan tersebut mengalami kerugian bersih hampir f 200.000 (sama dengan 10% dari total keuntungan Bank Jawa) (Van Horn 1997, 149-55). Kecurangan Bauermann menunjukkan kontrol keuangan yang lemah di lembaga-lembaga yang ada pada Bank Jawa dan, setelah krisis keuangan yang meluas pada tahun 1884, kecurangan tersebut menyebabkan manajemen dan solvabilitas bank tersebut dipertanyakan secara meluas (Claver 2014, 120-31). Hancurnya kepercayaan masyarakat kolonial pada bank berakibat buruk, karena nilai dari uang kertasnya bergantung pada kepercayaan; Bank Dorrepaalsche di Jawa runtuh pada tahun 1886 karena banyak dari alasan-alasan yang sama setelah reputasinya dipertanyakan (Claver 2014, 114-8).

Meskipun uang kertas dan jenis-jenis kertas finansial lainnya merupakan bentuk uang kredit yang penting untuk memperoleh kain katun dari jaringan perdagangan Eropa, uang kertas dan kertas-kertas finansial lainnya ini hampir-hampir tidak ada hubungannya dengan perdagangan kain dan damar di daerah setempat. Pedagang grosir seperti Bauermann menjual secara kredit, dengan menyerahkan terlebih dahulu, kain katun dalam jumlah besar kepada pedagang tangan kedua. Setelah ditukar oleh anak dagang mereka dengan hasil hutan seperti damar, pembayaran untuk kain katun yang telah mereka terima akan diserahkan kepada Bauermann dalam bentuk barang (Van Hoëvell 1893, 6). Seluruh perdagangan komoditas tersebut dengan demikian banyak dilakukan tanpa media pertukaran, meskipun uang sebagai "satuan hitung" terus berperan dalam rekening-rekening Bauermann. Jika diperlu-

kan, Bauermann dapat meminta para pedagang tangan keduanya untuk mencatat pembayaran yang akan dibayar di kemudian hari untuk kain katun yang diserahkan di muka ini dalam sebuah surat promes, yang merupakan surat sanggup bayar hutang yang menjanjikan pembayaran kembali pada tanggal tertentu. Bauermann kemudian dapat menggunakan surat promes ini sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman dari Bank Jawa (Claver 2014, 85). Karena penilaian terhadap pembayaran yang akan dilunasi di kemudian hari untuk barang yang diberikan di awal ditentukan oleh Bauermann dan bergantung pada harga yang dia tentukan pada kain yang dia berikan di awal dan pada damar yang dia ambil sebagai pembayaran, penilaian tersebut sangat mudah dimanipulasi. Di seluruh Eropa dan dunia kolonial, sistem "barter toko" seperti itu dikenal sebagai "sistem truk" dan dicerca karena manipulasi harga yang banyak dilakukan di dalamnya. Sistem surat promes ini membuat Bauermann bisa dengan segera mengubah kainnya yang belum terjual yang beredar di daerah-daerah dataran tinggi menjadi "uang tunai di tangan" yang dapat digunakan untuk pembelian lebih lanjut barang-barang perdagangan Eropa. Namun demikian, di balik uang kertas yang digunakan, terdapat serangkaian hubungan yang stabil dengan para pedagang tangan kedua yang mana darinya uang kertas tersebut memperoleh nilainya. Uang kertas tersebut merupakan "mata uang sosial" seperti halnya uang kain yang digunakan oleh suku-suku bangsa pribumi di pulau Sulawesi.

Dengan demikian, "teknologi pertukaran" yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan perdagangan di Hindia Belanda memanfaatkan seluruh jenis praktik keuangan yang dikembangkan di ekonomi pasar Eropa untuk melakukan perdagangan di sebuah pulau tanpa mata uang yang dikeluarkan negara kolonial yang

berfungsi sebagai media pertukaran. "Kertas finansial," seperti surat promes, surat wesel, dan uang kertas, berperan sebagai uang peruntukan khusus yang berfungsi sebagai media pertukaran yang memungkinkan perusahaan-perusahaan perdagangan Eropa beroperasi seolah-olah dalam sebuah "ekonomi yang tercerabut" (*disembedded economy*) daripada di daerah-daerah dataran tinggi Sulawesi tanpa pasar. Nilai dari uang-uang peruntukan khusus Eropa ini bergantung pada perdagangan lokal; uang-uang peruntukan khusus tersebut merupakan sebuah 'fetis' yang menjaga keberlangsungan transaksi-transaksi barter jangka panjang, yang sebaliknya menjamin nilai lokal dari uang-uang tersebut. Tidak seperti uang peruntukan umum yang sebenarnya, teknologi pertukaran peruntukan khusus ini dapat menjembatani kesenjangan antara lingkup pertukaran pasar "tercerabut" yang diharapkan "memenuhi syarat-syarat ekonomi" di antara orang-orang Eropa dan pertukaran barter yang dilakukan oleh para pedagang tangan kedua mereka melalui barter pembukuan. Dengan demikian, teknologi pertukaran peruntukan khusus tersebut memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan transaksi tunai; hal ini menyebabkan ketergantungan pada barter di daerah-daerah dataran tinggi terus berlanjut.

Perdagangan tangan kedua dan ketiga

Pedagang-pedagang tangan kedua dan perantara ketiga mereka diberi kain di muka dengan pembayaran melalui kredit jangka panjang yang akan mereka bayar dengan damar dan rotan yang diperoleh dari penduduk dataran tinggi. Teknologi pertukaran yang menjembatani ini disebut sebagai *barter pembukuan*. Barter pembukuan dalam berbagai bentuk adalah hal yang umum dalam sistem pertukaran kolonial di Amerika, Australia, dan Asia

Tenggara (Baxter 2004; Huff 1989) di mana "peran akuntansi dalam sebuah ekonomi yang tidak memiliki atau kekurangan bank dan uang tunai adalah untuk melancarkan barter" (Carnegie 2004, 75). Dalam barter pembukuan, uang tidak digunakan sebagai media pertukaran yang beredar; sebaliknya, uang berfungsi sebagai sebuah alat akuntansi, yaitu sebagai "satuan hitung" dan "standar nilai" yang dicatat dalam pembukuan pedagang. Bentuk uang sebagai satuan hitung ini menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Satuan hitung bisa dideominasi, misalnya, dalam satuan-satuan mata uang negara Hindia Belanda, atau, dalam bentuk komoditas – helai kain. Maka, dari satu perspektif, pertukaran dengan penduduk dataran tinggi dapat dipandang sebagai kegiatan yang melibatkan mata uang kolonial "imajiner;" dari perspektif lain, dapat dipandang sebagai barter; dari perspektif ketiga, dapat dipandang sebagai penjualan yang menggunakan "uang komoditas" (kain, yang merupakan uang peruntukan khusus yang digunakan oleh penduduk dataran tinggi). Interpretasi-interpretasi alternatif ini dimungkinkan karena 'terlalu kaku' dan 'terlalu kering'nya sifat dari hubungan pertukaran yang dianggap 'sempurna secara ekonomi' di mana barang-barang yang dipertukarkan tercerabut dari konteks sosial dan di mana pelaku pertukaran tercerabut dari ikatan-ikatan sosial.

Uang sebagai media pertukaran dalam ekonomi pasar memungkinkan pertukaran langsung barang-barang yang dapat dipertukarkan di antara orang-orang yang tidak saling mengenal. Sebaliknya, barter pembukuan dengan pemberian sebuah komoditas di awal - yang dalam kasus di sini, kain – mempersyaratkan adanya hubungan kepercayaan jangka panjang dan dicatat sebagai debit buku. Kemiripan formal antara catatan penjualan

tunai di pasar yang dimediasi oleh media pertukaran dan barter pembukuan damar dengan kain, seperti yang tercatat dalam buku akun pedagang dalam “satuan hitung” moneter, membuat pedagang bisa menggabungkan dua bentuk pertukaran tersebut dalam dua rezim nilai. Memang transaksi-transaksi dicatat sebagai debit dan kredit di buku akun pedagang, tetapi terlihat jelas di sini apa yang dibedakan oleh Wolters sebagai uang “keras” dan uang “imajiner”, yang secara bergantian menjalankan fungsi uang sebagai alat pertukaran dan uang sebagai satuan hitung. Penciptaan uang imajiner membutuhkan kemampuan numerasi pasar, yang merupakan kemampuan untuk menerjemahkan transaksi-transaksi barter ke dalam seperangkat buku akun.

Barter pembukuan menjadi penting ketika perdagangan dilakukan lintas rezim nilai. Sebagai pedagang grosir, Bauermann dan Perusahaan Dagang Gorontalo bergantung pada sekumpulan pedagang tangan kedua Cina dan Arab (yang disebut *anakoda* dalam bahasa Bugis) yang meneruskan produk dagangan ke pedagang tangan ketiga mereka, yang disebut *todo* dalam bahasa Bugis dan *anak dagang* dalam bahasa Melayu; *todo* atau *anak dagang* ini adalah orang Bugis pesisir yang menikah campur dengan orang suku bangsa pedalaman (Adriani dan Kruyt 1912, 2:305; Claver 2014, 83; Van Musschenbroek 1880, 93). Hutang yang diciptakan oleh barter pembukuan ini, pada gilirannya, menghasilkan kepatuhan jangka panjang. Para pedagang ini memiliki kemampuan numerasi pasar, yang merupakan modal budaya untuk menghitung pembayaran untuk sebuah pertukaran barter dalam satuan hitung. Keterampilan ini tidak dimiliki oleh mitra pertukaran barter mereka di pedalaman. Etnografer misionaris Albert Kruyt (Adriani dan Kruyt 1898, 143) memberikan sebuah contoh:

Sebuah keunikan orang Toraja [sebuah suku bangsa di dataran tinggi Sulawesi] adalah bahwa mereka tidak mema-sukkan waktu dan kesulitan mereka dalam penghitungan pembayaran, dan pedagang Bugis, pedagang Cina, dan pedagang-pedagang lainnya harus bersyukur atas hal tersebut dan bahwa orang Toraja terus memasok damar untuk mereka. Seorang laki-laki Toraja yang sangat kuat dapat membawa 40 kati damar tetapi ia harus memikul beban ini dengan berjalan kaki selama 1, 1½ atau 2 hari. Untuk damar sebanyak ini, dia menerima tiga helai (dengan panjang tertentu) kain kasar dari pedagang dengan harga f 1,25 sehelai sesuai dengan nilai dagang Sulawesi Tengah. Dengan demikian, dalam pikirannya, dia harus bekerja keras selama tiga hari termasuk bekerja mengumpulkan damar, untuk mendapatkan f 3,25 sementara kain yang sama dijual di pusat-pusat perdagangan utama dengan harga f 0,75 hingga f 0,90.

Kruyt menunjuk pada modal budaya dari orang-orang yang memiliki kemampuan dalam melakukan numerasi pasar, termasuk dirinya, yang mampu mengubah kain menjadi nilai tunai, dan karenanya mampu menghitung potensi keuntungan moneter di pasar. Hal ini berlawanan dengan “keunikan” penduduk dataran tinggi, yang menilai kain secara berbeda dan yang beranggapan bahwa nilai pasar tidak relevan meskipun mereka kemudian menggunakan kain tersebut sebagai uang pertukaran khusus. Barter pembukuan, yang dapat didenominasi dalam satuan mata uang, atau dalam bentuk komoditas – yang dalam hal ini, kain katun - menawarkan fleksibilitas yang tinggi di sini. Dengan demikian, kain katun yang diberikan di awal dengan pembayaran belakangan berfungsi sebagai dua jenis uang

dalam dua lingkup pertukaran secara bersamaan: di satu sisi, sebagai hutang yang tercatat dalam surat promes kepada pedagang yang diubah menjadi uang kertas yang beredar sebagai media pertukaran di pasar; dan di sisi lain, sebagai uang komoditas peruntukan khusus yang beredar di dataran tinggi.

Oleh karena itu, perdagangan damar bergantung pada sekelompok pedagang tangan kedua yang terlibat dalam hubungan barter pembukuan jangka panjang dengan, salah satunya, Perusahaan Dagang Gorontalo. Salah satu yang paling berhasil di antara pedagang-pedagang tersebut adalah Ong Hi Bie, yang memiliki agen di Parigi, Sausu, Mapane, Poso, Tojo, Bailo, dan Bongka di Teluk Tomini; perdagangan ini menghubungkannya dengan istana kerajaan Sigi, Parigi dan Tojo (Gambar 1; Kruyt 1893b, 102, 105-8, 110). Di sisi timur pulau Sulawesi, di Teluk Mori, perdagangan damar dikuasai oleh seorang Muslim Tionghoa yang berbahasa Belanda (Baba Guru, atau Ong Ceng Sien), lulusan sekolah Belanda di Makassar yang mulai berdagang di daerah tersebut di sekitar tahun 1860. Dia melakukan perkawinan cerdas dengan anggota-anggota keluarga raja dari kerajaan Mori dan kerajaan Bungku yang bertetangga (meskipun bermusuhan) (Adriani & Kruyt 1900, 164, 167). Di Teluk Bone di selatan pulau Sulawesi, perdagangan di kerajaan Luwu' didominasi oleh seorang etnis Arab, Said Ali Saffi, yang menikah dengan seorang "keponakan/sepupu" raja dan memperoleh pengaruh besar di dalam istana terutama melalui bisnis impor senjata yang dia jalankan (Kruyt 1898, 5).

Namun demikian, pola-pola budaya perdagangan berubah dalam bentuk pergeseran dari barter pembukuan ke pedagang-pedagang barter tangan ketiga. Pedagang-pedagang tangan ketiga, yang didominasi orang Bugis (*todo*), yang berdagang damar dengan sistem barter di

pedalaman telah terlibat dalam perdagangan terpencil hasil-hasil hutan dan laut selama berabad-abad dengan baik pedagang Eropa maupun pedagang Cina (Van Musschenbroek 1880, 94; Wellen 2014, 60-66). Jaringan-jaringan perdagangan mereka menghasilkan sebuah diaspora yang luas di seluruh nusantara dan sebuah budaya perdagangan unik yang akhirnya dikodifikasi oleh pemimpin Bugis Amanna Gappa pada tahun 1676 di Makassar dan diratifikasi oleh para pemimpin komunitas diaspora Bugis. Dua puluh lima bab dari kode tersebut menjelaskan peraturan-peraturan terperinci tentang semua aspek perdagangan dan navigasi; yang menarik dalam kode tersebut adalah sebelas bab tentang praktik-praktik bisnis yang adil dan pembagian keuntungan dan kerugian (Wellen 2014, 70-6). Penyebutan yang meluas di Sulawesi Tengah terhadap pedagang tangan ketiga sebagai *todo* dan pedagang tangan kedua sebagai *anakoda* (Adriani 1928, 16, 853) menjelaskan hubungan mereka dalam kode perdagangan pribumi ini.

Seorang *anakoda* (yang secara harfiah berarti kapten kapal dengan muatan barang dagangan) biasanya memanfaatkan seorang *todo* lokal (perantara, penjamin) untuk mengelola perdagangan barternya yang memper-tukarkan kain dengan damar dan rotan. *Todo* tersebut hanyalah perantara dan tidak dianggap sebagai pihak dalam pertukaran; dia lebih dianggap sebagai orang yang bertugas, dengan imbalan komisi, "memperkenalkan" kedua pihak dalam pertukaran (*anakoda* dan peng-umpul damar dataran tinggi) dan menjamin pembayaran kembali dalam bentuk barang kepada *anakoda*. Dalam hubungan *bagilaba* antara *anakoda* dan *todo*, kedua pihak masing-masing memiliki beberapa tanggung jawab khusus; ada banyak jenis hubungan bagi hasil, tetapi yang paling relevan di sini adalah *bagilaba-Cina* (bagi hasil Cina), yang memberi

anakoda 90% dari keuntungan (dalam bentuk barang), dengan *todo* bertanggung jawab atas semua kerugian hingga maksimal senilai 10 % dari bagian mereka (Matthes 1869, 55). Sebelum *todo* menyelesaikan pertukaran barter dengan damar dengan penduduk dataran tinggi atas nama *anakoda*, kain katun yang diberikan di awal (dengan pembayaran di belakang) kepada penduduk dataran tinggi tetap menjadi properti nominal *anakoda* / Perusahaan Dagang Gorontalo; risiko penduduk dataran tinggi tidak membayar kain yang telah mereka terima di depan sebagian besar ditanggung *todo*.

Bagi penduduk dataran tinggi yang mempertukarkan damar dengan kain, teknologi pertukaran penjemabatan barter pembukuan dan *bagilaba-Cina* tetap tidak terlihat. Kedua teknologi pertukaran ini masing-masing merupakan modal budaya dari sebuah register nilai yang berbeda dalam rangkaian pedagang tangan pertama, tangan kedua, dan tangan ketiga. Dalam situasi-situasi seperti ini, yang pada akhirnya bergantung pada barter, Adam Smith ([1778] 1798, 27-34) berpendapat bahwa ketidaknyamanan yang terus mengganggu dari “munculnya dua keinginan yang terjadi secara bersamaan” akan mengarah pada diadopsinya sebuah uang komoditas, komoditas yang diinginkan oleh semua pihak yang dapat berfungsi sebagai media pertukaran. Tentu saja contoh-contoh dari proses tersebut dapat ditemukan dalam banyak kasus lain dari barter pembukuan tidak langsung seperti ini (Baxter 2004, 135). Fakta bahwa barter pembukuan dapat dideominasi ke dalam barang-barang perdagangan, dalam helai kain, akan mendorong diadopsinya kain sebagai uang komoditas. Namun demikian, seperti yang akan kita lihat, uang komoditas ini diadopsi oleh penduduk dataran tinggi bukan sebagai media pertukaran. Adopsi kain sebagai uang peruntukan khusus adalah hasil dari perintah negara, dan kain

sebagai uang peruntukan khusus ini berguna sebagai alat pembayaran hanya dalam sistem denda yang didukung oleh negara pesisir.

Kain katun dan pembentukan negara pribumi

Pengenalan kain katun sebagai uang komoditas memiliki sejarah panjang di Sulawesi. Kerajaan Buton di sebuah pulau di tenggara Sulawesi yang juga bernama Buton telah mengeluarkan mata uang kain katun yang disebut *kampua* pada abad keenam belas, yang kemudian beredar luas (Gittinger 1979, 202); mata uang kain katun tersebut dikenal sebagai *kolokompa* di Sulawesi tengah dan masih sangat dihargai sebagai dasar pembayaran mas kawin pengantin (*pu'u oli*), karena diyakini dapat meningkatkan kesuburan (Kotilainen 1992, 76-80). Diketahui juga bahwa perdagangan budak Bugis di Makassar pada abad ketujuh belas dan kedelapan belas didasarkan pada pertukaran kain dengan budak (Sutherland 2001, 399, 403). Maka, di sini, saya bermaksud mengeksplorasi pola perdagangan jangka panjang yang melibatkan peredaran uang kain sebagai alat pembayaran dan hubungannya dengan perbudakan hutang dan pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya seperti yang terlihat pada perdagangan damar oleh para pedagang Bugis dan kerajaan-kerajaan pesisir yang mereka pengaruhi di akhir abad kesembilan belas. Uang kain buatan Eropa ini tidak menjadi media pertukaran; uang kain tersebut lebih menjalankan fungsi uang lainnya, yaitu sebagai "alat pembayaran" untuk melunasi hutang. Perbedaan halus ini menimbulkan “pembelian paksa” (*maoli*) yang membawa kewajiban-kewajiban yang ada dalam pertukaran hadiah: memberi, menerima, dan membalas (Kruyt 1923; Mauss 1923; Schrauwers 2019).

Yang terjadi pada suku To Wana, sebuah kelompok kecil yang tinggal tepat di utara lembah sungai Sumara, adalah sebuah contoh dari pola di atas (Atkinson 1989; Kruyt 1930). Lembah sungai Sumara adalah salah satu dari dua pusat perdagangan damar setelah tahun 1870, dengan kerajaan Mori mengembangkan sebuah pos perdagangan di Watambayoli di Teluk Mori di sekitar tahun 1880 dan kerajaan Bungku, saingannya, mendirikan sebuah pos tepat di sebelah timurnya, di Tokala; Tojo memasuki lembah sungai tersebut dari pantai utara. Mengingat persaingan yang ketat antara kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut, penguasa Mori menyatakan bahwa lembah sungai tersebut adalah wilayah netral selama setiap pencari damar membayar pajak (*buang tana*) berupa satu helai kain per setiap kelompok pemanen; diperkirakan bahwa penguasa Mori memperoleh penghasilan hampir 1000 helai kain per tahun dari pembayaran pajak tersebut (Goedhart 1908, 521; Kruyt 1900, 437).⁵ Dia menunjuk seorang pedagang Arab yang menikah dengan salah satu budak/keponakannya di Watambayoli sebagai *Kapitan laut* (kepala pelabuhan) untuk memungut pajak dan menjaga ketertiban di pedalaman (Maengkom 1907, 857). Sekitar lima belas pencari damar berkumpul di daerah itu setiap tahun, dan mengekspor sekitar 20.000 pikul damar.

Suku To Wana, yang tinggal di luar wilayah Mori, di sisi timurnya, dimasukkan ke dalam kerajaan Bungku selama periode intensifikasi perdagangan ini. Kontrol perdagangan damar

bergantung pada kontrol atas tenaga kerja rakyat. Oleh karena itu, Bungku mendeklarasikan supremasinya atas empat konfederasi desa konstituen To Wana dan menunjuk *basal* atau kepala salah satu dari keempat konfederasi desa tersebut sebagai *makole tongko* (kepala daerah) yang bertanggung jawab menyerahkan upeti dari mereka semua (*mepue*, mengakui sebagai raja melalui pemberian upeti). Sebagai imbalan atas upeti tersebut, raja Bungku mengirimkan kain katun "senilai delapan koin perak" (yaitu 8 helai kain), yang dibagikan kembali ke empat konfederasi desa (Kruyt 1930, 467). Pertukaran kain dengan hasil-hasil hutan ini dikenal sebagai *mobalu sala* (yang berasal dari istilah Bugis *mabbuluq sala*, "perdagangan salah"), di mana seorang penguasa memiliki hak utama untuk memerintah orang kepercayaannya melakukan "pembelian paksa" dengan harga diskon sebelum orang biasa diizinkan untuk membeli (Koolhof 1999, 377). Contoh dari pengenalan sebuah "standar nilai" yang disetujui oleh negara ini mirip dengan contoh-contoh yang dikutip oleh C.A. Gregory (1996) tentang uang kerang yang diperkenalkan di Benin, Afrika, dan Papua Nugini.

Kruyt mencatat banyak sekali contoh *mobalu sala* di kerajaan-kerajaan pesisir lainnya, dan hal ini menunjukkan meluasnya penggunaan praktik-praktik ini untuk menjalin hubungan kekuasaan di dataran tinggi Sulawesi Tengah. Di kalangan To Pamona, Luwu' berhak atas pertukaran paksa dua ekor sapi dengan sehelai kain, sepotong celana panjang, dan sepotong

⁵ Strategi ini tampaknya umum diterapkan di semua kerajaan pesisir. Penguasa Tojo memperoleh sebagian besar pendapatannya dari perdagangan damar, dengan awalnya dirinya sendiri yang bekerja sebagai pedagang (dengan memanfaatkan *mobalu sala* untuk memperoleh damar dengan harga murah), dan baru belakangan menyerahkan perdagangan tersebut kepada pedagang Cina Ong Hi Bie dan memungut pajak f 1 per pikul dari setiap pengumpul damar dan pajak ekspor f 0,25 per pikul yang dikenakan kepada

pedagang (Kruyt 1893b, 110). Mencara Malili, sebuah vasal (kerajaan bawahan) dari kerajaan Luwu', memungut pajak 10% dari para pengumpul damar di sekitar Danau Towuti (Goedhart 1908, 513-14). Kerajaan Sigi bersekongkol dengan kerajaan pesisir Parigi untuk menguasai sebuah daerah kaya rotan yang dikenal sebagai Tana Boa sehingga mereka dapat berbagi pajak pengumpul damar di pelabuhan perdagangan Toruwe yang mereka dirikan di sana (Adriani dan Kruyt 1898, 390-1, 394).

kerudung untuk setiap pernikahan atau pemakaman kerajaan (Adriani & Kruyt 1912, I:132). “Pembelian paksa” dengan kerajaan-kerajaan ini adalah sebuah contoh dari pola pertukaran yang lebih umum yang dikenal sebagai *maoli* (“hadiah paksa yang mewajibkan timbal balik” atau “pembelian paksa”), yang, seperti hadiah *Mauss*, berisi kewajiban untuk memberi, menerima, dan membalas (Mauss 1923; Schrauwers 2019).⁶ Kruyt menafsirkan *maoli* sebagai “hadiah/pembelian paksa,” seperti yang mungkin ditunjukkan oleh contoh dari *mobalu sala*, meskipun “non-pembelian paksa” mungkin lebih akurat, seperti yang diilustrasikan oleh penggunaan lainnya dalam mas kawin pengantin (*oli mporongo*). Dalam acara penyerahan mas kawin pengantin, pengantin perempuan tidak dibeli; lebih tepatnya, keluar-ga pengantin perempuan diberi kompensasi atas sebuah kerugian. Karena alasan inilah, kata yang berarti denda, “retribusi” (*saki*), diguna-kan secara sinonim dengan harga (*oli*, yang karena hal ini mas kawin pengantin juga disebut sebagai *saki mporongo*). Demikian pula, kata *bayari*, “pembayaran,” juga mengandung makna “yang diberikan sebagai imbalan atas hadiah” dan “retribusi yang dibayarkan atas sebuah kejahatan” (Adriani 1928, 35, 172, 516, 671).

Pengenalan kain sebagai alat pembayaran (bukan alat pertukaran) lebih jauh dikonsolidasikan dengan pengenalannya dalam proses penyelesaian sengketa, yang berlangsung melalui penerapan denda; sistem denda baru di kalangan orang To Wana didasarkan pada pembayaran kain yang hanya tersedia dari Bungku melalui pengumpulan damar. *Makole*

tongko diberi akses khusus ke barang-barang perdagangan ini dan, melalui kemampuannya membayar denda dari mereka yang dituduh melakukan kejahatan (yang seringkali dibayar oleh dirinya sendiri), mendapatkan mereka sebagai budak hutang (senilai 25 helai kain). Beberapa budak hutang dijual ke To Bungku, sehingga membuat perdagangan budak di pulau tersebut terus berjalan (Kruyt 1930, 460-61). Sebuah dinamika serupa antara konfederasi-konfederasi desa dataran tinggi dan kerajaan-kerajaan pesisir yang melibatkan kain sebagai alat pembayaran dan perbudakan hutang berlangsung di seluruh Sulawesi Tengah (Adriani dan Kruyt 1898, 376-78, 390-91, 394; Adriani dan Kruyt 1912, I: 48ff., 140; Kruyt 1950, I:45, 325). Konfederasi-konfederasi desa di sekitar Danau Poso memiliki mitos asal-usul yang menjelaskan ketundukan mereka pada Kerajaan Luwu’ di selatan; mereka juga membayar upeti dan mengakui sistem denda yang diterapkan oleh penguasa Luwu’ yang didasarkan pada pembayaran dengan kain katun. Suku To Mori juga mengubah sistem denda mereka dari sistem yang didasarkan pada ternak menjadi sistem yang didasarkan pada kain katun (yang dikenal sebagai “ternak Mori”). Melalui kekayaan yang dihasilkan oleh pajak yang dia kenakan kepada para pengumpul damar, penguasa Mori mampu membayar denda orang lain dan, oleh karena itu, memperoleh budak-budak hutang, yang kemudian membentuk sebuah koloni penuh di sekitar istananya. Wakil penguasa Mori, *Bonto*, memiliki akses khusus ke barang-barang katun melalui ibunya, yang menikah dengan pedagang Cina Baba Guru; *Bonto* juga mendirikan

⁶ Contoh lebih lanjut dari *mobalu sala* adalah kerajaan Parigi di barat, yang meminta 200 hingga 400 ikat padi untuk ditukar dengan satu helai kain dari suku-suku bangsa yang tinggal di sekitar muara sungai Poso (Adriani dan Kruyt 1912, 1:138; Kruyt 1894, 13).

Suku To Pada di dataran tinggi tengah dipaksa oleh penguasa Mori untuk menukar ternak dengan sebuah gong atau lempengan tembaga dengan lubang yang dibor di tengahnya (Adriani dan Kruyt 1912, 1:136).

sebuah koloni pribadi budak-budak hutang (J. Kruyt 1924, 65, 67).

Kain katun sebagai mata uang sosial dalam perekonomian manusia

Kita perlu mengetahui bagaimana perbudakan hutang dengan mudah masuk ke dalam institusi-institusi yang telah ada sebelumnya jika kita ingin memahami dampak dari kemunculan secara tiba-tiba dari uang kain dalam jumlah yang sangat besar dari perdagangan damar. Praktik perkawinan suku To Pamona (termasuk suku To Wana) dan suku Mori serupa, dengan pengantin pria membayar mas kawin pengantin dan kemudian tinggal secara matriloal (tinggal di rumah atau pekarangan milik orang tua pengantin perempuan) untuk menjalani pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya selama beberapa tahun (Kruyt 1950, 2:321-23; Kruyt 1924, 76). Selama menjalani pengabdian tersebut, pengantin laki-laki muda menjadi bagian dari rumah tangga mertuanya, di mana dia menyumbangkan tenaga di bawah arahan mereka dan bersikap dengan penuh hormat dengan selalu mengutamakan kepentingan mereka. Dipercaya bahwa jika pengantin laki-laki tidak menunjukkan rasa hormat, dia akan terkena sebuah penyakit yang melemahkan (*buto*). Para budak disatukan dengan rumah tangga pemiliknya dengan cara yang sama persis seperti cara pengantin laki-laki di atas. Mereka tetap menjadi ‘anak-anak’ selamanya yang harus berperilaku penuh hormat kepada pemiliknya sekeluarga dan yang bisa terkena sanksi supranatural bila melanggar aturan-aturan tertentu (Kruyt 1950, 1:39-40). Namun demikian, menantu laki-laki, dengan meningkatkan pembayaran buat mas kawin pengantin, dapat mempersingkat masa pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya dan membangun

rumah tangga mandiri mereka sendiri lebih cepat dengan cara yang tidak dapat dilakukan budak. Di kalangan masyarakat To Pamona, misalnya, angsuran sekunder yang lebih besar buat mas kawin pengantin biasanya dibayar oleh keluarga pengantin laki-laki setelah anak pertamanya lahir sehingga paternitasnya (statusnya sebagai ayah kandung) diakui; hal ini biasanya menandai terbentuknya rumah tangganya sendiri dan mengakhiri periode pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya. Bagi orang laki-laki yang menikah dengan budak perempuan, ketidakmampuan untuk membayar angsuran kedua ini membuat semua anaknya berstatus budak (Adriani dan Kruyt 1912, 2:25).

Ketika kekayaan kain katun yang dihasilkan dari perdagangan damar membanjiri daerah-daerah dataran tinggi, masyarakat To Pamona semakin meniru pernikahan kerajaan yang dipraktikkan di kerajaan-kerajaan pesisir sebagai cara untuk mempersingkat masa pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya. Dalam upacara panjang yang dikenal sebagai *mebolai* (“membuat sebuah rumah untuk diri sendiri”), pengantin laki-laki berjalan perlahan dan dengan khidmat dengan didampingi sebuah rombongan pengiring untuk memboyong pengantin perempuan dengan membayar baik pembayaran utama (*pu’u oli*) maupun pembayaran sekunder (*oli mporongo*) sekaligus; dengan membayar dua jenis pembayaran ini sekaligus, dia langsung terbebas dari kewajiban menjalankan pengabdian kepada pengantin perempuan dan keluarganya (Kruyt 1950, 2:301). Kain yang diterima dari Luwu’ dari hasil pertukaran dengan ternak melalui *mobalu sala* dengan demikian memungkinkan diadakannya baik pernikahan kerajaan maupun tiruan lokalnya. Seperti halnya denda (*saki*) yang bisa dibayar dengan kain dapat menjebloskan seseorang ke dalam per-

budakan hutang, pembayaran dengan kain (*oli*, sinonim dari *saki*) dapat membebaskan seseorang dari pengabdian seperti budak kepada pengantin perempuan dan keluarganya.

Posintuwu (perwujudan hidup dalam kerukunan) adalah sumbangan dari sanak saudara untuk dikumpulkan menjadi mas kawin pengantin atau untuk ritual pemakaman sekunder. Karena hampir tidak ada orang yang mampu membayar biaya tinggi untuk ritual-ritual ini sendirian, pola pemberian hadiah dan hutang seperti itu memperkuat jaringan-jaringan yang tersebar di mana-mana dari kerabat laki-laki yang menikah di luar desa kelahiran mereka. Orang-orang yang dikenal karena besarnya hadiah mereka, seperti mereka yang membayar denda dari kerabat mereka, dikenal sebagai *kabosenya* (orang besar) di kalangan masyarakat To Pamona. Dengan demikian, pembayaran baik hadiah maupun denda menciptakan modal sosial, yaitu jaringan-jaringan kredit dan kewajiban yang memperkuat kepemimpinan, tetapi, di sisi lain, juga kadang-kadang membuat beberapa orang terperosok ke dalam perbudakan hutang. Investasi budak dengan menggunakan kain (melalui pembayaran denda mereka, bukan melalui pembelian) menunjukkan betapa peredaran kain dapat menciptakan modal sosial; artinya, ketika kain diedarkan untuk pembayaran denda, dalam pertukaran *maoli*, dan melalui hadiah (*posintuwu*), kain menciptakan jaringan-jaringan hutang yang memperkuat hierarki.

Dengan demikian, di sini kita mendapatkan

indikasi yang jelas bahwa tindakan-tindakan kerajaan Bungku tersebut menjadikan kain katun sebagai alat pembayaran, sebagai sebuah uang peruntukan khusus, seperti yang diemukakan oleh ahli-ahli ekonomi aliran historis (Kahn 1990; lihat catatan 2). Begitu sejumlah helai kain diperoleh, mereka tidak dikenakan; mereka disimpan dalam sebuah keranjang di lumbung padi hingga digunakan untuk membayar denda atau sebagai hadiah dalam sebuah “pertukaran hadiah.” Kain katun digunakan sebagai alat pembayaran dan tidak digunakan sebagai media pertukaran; perdagangan di seluruh dataran tinggi, termasuk di beberapa pasar yang ada yang sedikit sekali jumlahnya, dilakukan melalui barter.⁷ Ironisnya, koin apa pun yang masuk ke dataran tinggi dilebur menjadi lempengan tembaga (*dula*), yang, seperti kain katun, hanya digunakan untuk membayar denda dan sebagai hadiah.

Sekarang seharusnya sudah jelas bahwa konsepsi “pembelian” (*maoli*) dari orang dataran tinggi tanpa pasar didasarkan pada pengalaman mereka tentang “perdagangan salah” (*mobalu sala*) yang didukung negara, dan bukan pada model pemberian hadiah (*posintuwu*) atau barter (“perdagangan umum” dalam kode komersial Bugis). Baik *maoli* maupun *mobalu sala* melibatkan sebuah permintaan paksa atas barang-barang yang dibayar dengan mata uang komoditas yang secara magis sangat berpengaruh (kain) yang diperkenalkan oleh kerajaan-kerajaan dataran rendah sebagai alat pembayaran untuk denda, dan bukan untuk

⁷ Tidak ada pasar di dataran tinggi di antara kelompok-kelompok etnis yang disebut sebagai To Pamona atau “Koro Toraja” (Bada, Besoa, Napu, Rampi). To Mori memiliki “tempat-tempat pertemuan” kecil (*olu*) tempat barter berlangsung, dan dua pasar barter berskala besar yang diadakan setiap 15 hingga 20 hari di desa pedalaman Sokita dan Sokoio, yang mungkin dikunjungi seribuan orang. Pasar-pasar ini diorganisir

di seputar perdagangan damar; mereka dihancurkan selama tahun 1890-an dalam upaya untuk mengontrol arus perdagangan damar. Banyak *todo* didirikan di pemukiman-pemukiman pesisir di kerajaan Luwu’, Bungku, Mori, Tojo, Sigi, dan Parigi (Goedhart 1908, 513-14, 521, 541-2; Kruyt 1892, 246; 1893a, 4, 6, 7, 10; 1893b, 102, 110; 1900a, 143-4, 149-50, 215; 1900b, 461-62; Van Hoëvell 1891, 38, 42; 1893, 4, 7; Van Musschenbroek 1880, 93, 97).

sebuah “ekuivalen ekonomi”, seperti yang diharapkan dalam barter. Uang komoditas ini tidak banyak berfungsi sebagai media pertukaran untuk “melancarkan barter”, tetapi ia lebih banyak digunakan untuk membayar denda antisipatoris atas sebuah tindakan apropriasi - retribusi untuk tuntutan upeti (Schrauwers 2019). Mata uang sosial inilah yang digunakan dalam pembayaran semua denda dan dalam semua “pemberian hadiah total” sedemikian rupa sehingga, saat mata uang sosial tersebut beredar, ia menciptakan jaringan-jaringan sosial hierarkis. Pemberian-pemberian hadiah total ini menjalankan kerja reproduksi sosial, tetapi dalam melakukan hal tersebut, mereka telah

membuat reproduksi sosial masyarakat dataran tinggi bergantung pada komoditas yang berasal dari luar wilayah.

Kesimpulan

“Kehidupan sosial” dari kain katun saat melintasi tiga register nilai ini bergantung pada sejumlah uang peruntukan khusus yang berbeda-beda yang berfungsi untuk melancarkan barter tanpa memerlukan uang universal yang berfungsi sebagai alat pertukaran. Setiap

uang peruntukan khusus ini merupakan perwujudan dari nilai lokal dalam perdagangan komoditas antar budaya tetapi menjalankan hanya beberapa fungsi terbatas dari uang peruntukan umum, dan itu pun hanya dalam lingkup-lingkup pertukaran mereka yang berbeda-beda. Dengan mengkaji perdagangan ini dalam sebuah kerangka umum, konstitusi budaya dari bentuk-bentuk pertukaran tersebut disorot, demikian juga *batasan-batasan* terhadap pelaku perdagangan yang ditimbulkan oleh bentuk-bentuk pertukaran tersebut. Oleh karena itu, transaksi yang sama yang berlangsung lintas register nilai dapat, sebagaimana saya catat, dipandang sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan sebuah mata uang kolonial yang dicatat sebagai sebuah “satuan hitung” dalam pembukuan, sebagai barter, dan sebagai "pembelian paksa" dengan menggunakan uang komoditas yang bergantung pada konstruksi budaya dari para pelaku perdagangan, yang tidak perlu dibagikan. Meskipun ada kesamaan formal di antara praktik-praktik pertukaran yang memungkinkan terjadinya perdagangan lintas register nilai (yang disebut sebagai “barter”), setiap register nilai ditandai dengan logikanya sendiri tentang “akumulasi modal.”

Jenis Uang	Fungsi Uang dalam Lingkup Pertukarannya				
	Alat Pertukaran	Alat Pembayaran	Standar Nilai	Satuan Hitung	Simpanan Kekayaan
Kertas finansial	ya	terbatas	tidak	ya	tidak
Barter pembukuan	terbatas	terbatas	ya	ya	tidak
Kain katun	tidak	ya	ya	ya	ya

Salah satu contoh dari hal di atas adalah keterbatasan uang kain sebagai alat pembayaran dan bukan sebagai media pertukaran yang membuat penggunaannya (*maoli*) menjadi sebuah bentuk “perdagangan salah” (retribusi atas permintaan upeti) dan bukan sebuah pendorong untuk barter “ekonomi.” Oleh karena itu, “pembelian” ini mengasumsikan bentuk hadiah Mauss, yang digunakan dalam pemberian hadiah yang dibalas dengan pengembalian yang lebih “berlimpah” dan wajib (Schrauwers 2019). Di sini juga terdapat kesamaan formal dengan barter pembukuan, dengan pengembangan kemitraan jangka panjangnya, pertukaran pada kredit jangka panjang, dan kewajiban untuk membalas dengan lebih berlimpah (dengan kata lain, memberi keuntungan). Memang barter pembukuan terlihat memiliki tampilan formal dari pertukaran pasar seperti yang tercatat dalam pembukuan, tetapi uang imajinernya tidak pernah beredar; akun-akun tersebut digunakan untuk meminta pertanggung-jawaban para pedagang kedua dan ketiga, yang terjebak dalam hubungan ketergantungan jangka panjang seperti ketergantungan penduduk dataran tinggi ke kerajaan-kerajaan pesisir. Kedua ikatan ketergantungan ini sama-sama dapat dipandang sebagai hadiah/pembelian Mauss karena pinjaman kredit membawa kewajiban untuk menerima dan membalas dengan pengembalian yang lebih besar. Namun, hadiah Mauss ini, ketika dicatatkan ke dalam buku rekening dan diubah ke dalam satuan hitung moneter, dengan hati-hati ditulis sebagai “keuntungan” ekonomi yang dihitung dengan hati-hati daripada sebagai upeti kepada pengusaha lokal.

Mengikuti contoh dekonstruksi Pietz (1995) tentang wacana fetisisme di Afrika Barat, saya telah memberi perhatian pada kesamaan-kesamaan dari perdagangan antar budaya ini

dengan contoh dari Tiv yang lebih dikenal, yaitu “lingkup pertukaran”. Analisis ulang terhadap kasus Tiv telah mengkaji penggunaan uang peruntukan khusus batang kuningannya dalam jaringan-jaringan pertukaran regional dan secara khusus dalam hubungan antara mas kawin pengantin, perbudakan, dan perdagangan komoditas kolonial (Guyer 2004). Para pedagang Eropa di kota-kota pelabuhan menciptakan jaringan-jaringan kredit barter pembukuan yang mempertukarkan batang kuning dengan perantara-perantara lokal untuk memperoleh budak yang akan dijual di pasar Atlantik (Graeber 2011, 151-54). Seperti dalam kasus Sulawesi Tengah, perdagangan komoditas kolonial mendorong pembentukan negara pribumi dan meningkatkan secara besar-besaran pertukaran mas kawin pengantin dan hutang dan perdagangan budak yang mendanainya. Saat perampokan budak berkembang pesat, “perkumpulan-perkumpulan pedagang rahasia” lokal bertindak sebagai penegak penagihan hutang; mereka adalah “kuil fetis” di pusat monopoli perdagangan (yang bertindak benar-benar seperti kerajaan-kerajaan pesisir Sulawesi) yang telah menetapkan batang kuning sebagai uang peruntukan khusus dalam pembayaran denda dan yang mendapat keuntungan dari perdagangan budak (Pietz 1995, 29).

Apa yang ditunjukkan oleh perbandingan Tiv adalah bahwa sebuah pola umum dalam pembentukan negara pribumi dalam konteks perdagangan Eropa dapat dilihat tidak hanya dalam kasus Sulawesi, tetapi juga dalam banyak contoh klasik lainnya yang melibatkan mata uang sosial, baik wampum di kalangan suku Iroquois atau selimut Teluk Hudson dalam ritual pesta besar-besaran di Pantai Barat Laut Pasifik Kanada. Dalam setiap kasus, uang-uang peruntukan khusus berkembang dari perdagangan lintas budaya yang pada akhirnya

berfungsi sebagai alat pembayaran daripada alat pertukaran pertukaran. Oleh karena itu, mereka dapat dikategorikan sebagai hadiah Mauss, yang mewajibkan pengembalian yang lebih besar dan mendorong berlangsungnya kompetisi-kompetisi sengit yang membangun hierarki sosial dari beberapa orang, di satu sisi, dan yang menjebloskan beberapa orang lainnya ke dalam status seperti budak, di sisi lain. Apa yang saya soroti dalam proses-proses ini yang didorong oleh perdagangan lintas budaya dengan orang Eropa adalah sifat "peruntukan khusus" dari teknologi perdagangan yang digunakan orang Eropa sendiri. Para pedagang Eropa menggunakan uang-uang peruntukan khusus, bukan "media pertukaran universal" yang dikaitkan Smith dengan mereka sebagai solusi untuk barter. "Uang peruntukan khusus" Eropa seperti uang kertas dan wesel jelas tertanam secara sosial dalam jaringan-jaringan sosial seperti halnya uang pribumi. Oleh karena itu, narasi-narasi kita tentang kasus-kasus klasik yang melibatkan uang bertujuan khusus pribumi ini perlu terus dilengkapi dengan analisis terhadap teknologi pertukaran Eropa dalam kerangka yang sama. Para pedagang Eropa jelas menggunakan teknologi pertukaran yang sama, hanya saja mereka menerjemahkan upeti sebagai keuntungan.

Referensi

- Adriani, N. 1928. *Bare'e - Nederlandsch Woordenboek met Nederlandsch-Bare'e Register*. Leiden: E.J. Brill.
- Adriani, N. & A.C. Kruyt 1898. "[Van Posso naar Parigi, Sigi dan Lindu](#)" *Mededeelingen NZG* 42: 369-535.
1899. "[Van Posso naar Todjo](#)" *Mededeelingen NZG* 43(1): 1-46.
- 1900 "[Van Poso naar Mori](#)" *Mededeelingen NZG* 44(1): 135-214.
1912. [De Bare'e-Sprekende Toradjas van Midden-Celebes](#) 3 vols. Batavia: Landsdrukkerij.
- Aragon, Lorraine. 1996. "Twisting the Gift: Translating Precolonial into Colonial Exchanges in Central Sulawesi, Indonesia" *American Ethnologist* 23(1): 43-60.
- Atkinson, Jane M. 1989. *The Art and Politics of Wana Shamanship* (Berkeley: University of California Press).
- Barnes, R.H. & Ruth Barnes. 1989. "Barter & Money in an Indonesian Village Economy" *Man N.S.* 24(3): 399-418.
- Baxter, William T. 2004. "Observations on Money, Barter and Bookkeeping" *The Accounting Historians Journal* 31(1): 129-39.
- Beurden, A.I.P.J. van. 1985. "De Indische 'Goldrush', goudmijnbouw en belied" dalam J. van Goor, ed. *Imperialisme in de Marge: De afronding van Nederlands-Indië*. Utrecht, Netherlands: HES Uitgevers, 179-226.
- Bohannon, Paul. 1959. "The impact of money on an African subsistence economy" *Journal of Economic History* 19: 491-503.
- Broersma, R. 1931a. "Gorontalo, een handelscentrum van Noord Celebes" *TKNAG* 48: 221-38.
- 1931b. "De beteekenis van Selebes Oostkust voor den Handel" *TKNAG* 48: 1039-49.
- Bulbeck, D. et al. 2016. "Mortuary Caves and the Dammar Trade in the Towuti-Routa Region, Sulawesi, in an Island Southeast Asian Context" *UI* 55(2): 150-83.
- Carnegie. 2004. "Re-examining the determinants of barter accounting in isolated communities in colonial societies" *Accounting History* 9(3): 73-87.
- Claver, Garry D. 2014. *Dutch commerce and Chinese merchants in Java [electronic*

- resource*] : *colonial relationships in trade and finance, 1800-1942*. Leiden: Brill.
- Dove, Michael R. 201. *The Banana Tree at the Gate: A History of Marginal Peoples and Global Markets in Borneo* (New Haven: Yale University Press).
- Gittinger, Mattiebelle. 1979. *Splendid Symbols: Textiles and Tradition in Indonesia*. Washington DC: The Textile Museum.
- Goedhart, O.H. 1908. "[Drie Landschappen in Celebes \(Banggai, Boengkoe, Mori\)](#)" *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 50: 442-548.
- Graeber, David. 2011. *Debt: the first 5,000 years*. Brooklyn, N.Y. : Melville House.
- Guyer, Jane I. 2004. *Marginal Gains: Monetary Transactions in Atlantic Africa*. Chicago: University of Chicago Press.
- Hart, Keith. 1986. "Heads or Tails: Two sides of the coin." *Man* n.s. 21(4): 637-56.
2017. "Money in a Human Economy" dalam Keith Hart, ed. *Money in a Human Economy*. New York: Berghahn Books, 3-14.
- Hoëvell, G.W.W.C. Baron van. 1891. "De Assistent-Residentie Gorontalo, voor zover die onder Rechtstreeksch Bestuur is Gebracht" *Tijdschrift KNAG* 2nd series, 8(1): 26-43.
1893. "[Todjo, Posso en Saoesoe](#)" *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 35(1): 1-47.
- Horn, N.A. van. 1997. "Het Indisch Handelshuis Bauermann in de negentiende eeuw" *NEHA Jaarboek* 60: 137-58.
- Huff, W.G. 1989. "Bookkeeping Barter, Money, Credit, and Singapore's International Rice Trade, 1870-1939" *Explorations in Economic History* 26: 161-89.
- Ingham, Geoffrey. 1996. "Money is a Social Relation" *Review of Social Economy* 54(4): 507-29.
- Kahn, Joel. 1990. "Towards a History of the Critique of Economism: The Nineteenth-Century German Origins of the Ethnographer's Dilemma" *Man* n.s. 25(2): 230-49.
- Koolhof, Sirtjo. 1999. "The 'La Galigo': A Bugis Encyclopedia and its Growth" *Bijdragen [KITLV]* 155(3): 362-387.
- Kotilainen, E.-M. 1992. "[When the Bones are Left](#)": *A Study of the Material Culture of Central Sulawesi*. Helsinki: Finnish Anthropological Society, Transactions No. 31.
- Kruyt, A. C. 1892. "[Mijne reis van Gorontalo naar Poso \(Posso\) met den Gouvernementsstoomer 'Zeeduif' 4-16 Februari 1892](#)" *Mededeelingen NZG* 36(2): 225-56.
- 1893a. "[Mijne eerste ervaringen te Poso \(vervolg\)](#)" *Mededeelingen NZG* 37(1): 1-30.
- 1893b. "[Mijne tweede reis van Gorontalo naar Poso](#)" *Mededeelingen NZG* 37(1): 101-14.
1894. "[Naar het Meer van Poso](#)" *Mededeelingen NZG* 38(1): 1-23.
1898. "[Van Palopo naar Poso](#)" *Mededeelingen NZG* 42: 1-106.
- 1900a. "[Eenige ethnographische Aanteekeningen omtrent de Toboengkoe en de Tomori](#)" *Mededeelingen NZG* 44(1): 215.
- 1900b. "De Zending te Posso in 1899" *Mededeelingen NZG* 44(3): 341-56.
- 1900c. "[Het Rijk Mori](#)" *Tijdschrift KNAG* 2nd series, 17: 436-66.
1923. "[Kopen in Midden Celebes](#)" *Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen Afdeling Letterkunde Series B*, 56: 149-78.
1930. "[De To Wana op Oost-Celebes](#)" *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 70: 397-627.
1933. "[Lapjesgeld op Celebes](#)" *Tijdschrift voor Indische Taal-, Land- en Volkenkunde* 73: 172-83.

1938. [*De West-Toradjas op Midden-Celebes*](#) 4 vols. Verhandeligen KAW, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 40; Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
1950. [*De Bare'e Sprekende Toradjas van Midden Celebes \(de Oost Toradjas\)*](#) 3 vols. Verhandeligen KAW, Afd. Letterkunde, Nieuwe Reeks, Deel 54; Noord Hollandsche Uitgevers Maatschappij.
- J. Kruyt. 1924. "[*De Moriërs van Tinompo \(oostelijk Midden-Celebes\)*](#)" *Bijdragen KITLV* 80(1): 33-213.
- Maengkom, F.R. 1907. "[*Dagboek van een tocht uit Todjo naar Mori \(Midden-Celebes\), en terug naar het Poso-Meer*](#)" *Tijdschrift KNAG tweede series* 24: 855-71.
- Matthes, B.F. 1869. *Over de Wadjorezen met hun Handels- en Scheepswetboek*. Makassar: P. van Hartrop Jr..
- Mauss, M. 1923. "Koope in Midden Celebes" *L'Année sociologique* Nouvelle série T. 1: 671-73.
- Musschenbroek, S.C.J.W. van. 1880. "[*Toelichtingen behoorende bij de Kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en aangrenzende landen*](#)" *TNAG* 4: 93-110.
- Pietz, William. 1995. "The Spirit of Civilization: Blood Sacrifice and Monetary Debt" *RES: Anthropology and Aesthetics* 28(2): 23-38.
- Polanyi, Karl. 1957. *The Great Transformation: The political and economic origin of our time*. Boston: Beacon Press.
- Schrauwers, Albert. 2011. "[*Money bound you – money shall loose you*](#)": Gift Giving, Social Capital and the Meaning of Money in Upper Canada" *Comparative Studies in Society and History*, 53(2): 1-30.
- 2019 "[*The Spirit of the Gift, the Price of Potency: A Maussian Model of the Southeast Asian State of Luwu*](#)" *Journal of the Royal Anthropological Institute* 25(4): 738-59.
- Sutherland, Heather. 2001. "The Makassar Malays: Adaption and Identity, c. 1660-1790" *Journal of Southeast Asian Studies* 32(3): 397-421.
2013. "By the Numbers: Makassar's Trade, Centralized Statistics and Local Realities" *Masyarakat Indonesia* 39(2): 289-305.
- Sutherland, K. 1864. *Het Muntwezen op Celebes*. Makassar: K. Sutherland, Makassaarsch Handels- en Advertentie-Blad.
- Wellen, Kathryn A. 2014. *The Open Door: Early Modern Wajorese Statecraft and Diaspora*. De Kalb: Northern Illinois University Press.
- Wolters, Willem G. 2008. "Heavy and light money in the Netherlands Indies and the Dutch Republic: dilemmas of monetary management with unit of account systems" *Financial History Review* 15(1): 37-53)